

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Menurut Hans Morgenthau, Hubungan internasional merupakan sebuah perjuangan untuk meraih kekuasaan diantara bangsa-bangsa (Clinton, Thomson, Morgenthau. 2005). Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu kewajiban sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita, Yani 2005:3-4).

Hubungan internasional tetaplah hubungan antarnegara. Seperti yang dikatakan Joyce P. Kaufman, Hubungan internasional merupakan bidang studi yang menyangkut dengan keputusan-keputusan yang dibuat dalam suatu negara yang mempunyai implikasi pada hubungan keluar dari perbatasan negara tersebut (Kaufman, 2015:2). Stanley Hoffman menambahkan, hubungan internasional dapat berupa berbagai aktivitas yang berbeda, seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya sejauh aktivitas tersebut memiliki implikasi bagi hubungan internasional. Menurut Hoffman, hubungan internasional itu berkaitan dengan semua transaksi, hubungan,

arus informasi, pertukaran dan respon dari perilaku yang dihasilkan antara dan diantara masyarakat terorganisasi (negara) yang terpisah (Hoffman 2000).

Dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara yang satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerjasama diplomasi. Hubungan internasional dapat menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan internasional menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat dunia internasional sehingga menciptakan ketergantungan antara negara satu dengan yang lainnya. Semakin banyaknya afiliasi membuat tidak adanya satu negara di dunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin beragam.

### **2.1.2 Diplomasi**

Diplomasi dapat diartikan sebagai aktivitas, keterampilan dalam mengelola hubungan internasional, melalui perwakilan dari suatu negara diluar negeri (<http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/diplomacy> diakses pada 4 april 2020). Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan resmi antarpemerintah dari negara-negara berdaulat, kadang juga hubungan dari negara yang berdaulat dengan negara vassal (Satow 2011:1). Terjadinya perubahan makna dari hubungan internasional (hubungan antarnegara menjadi masyarakat global) diplomasi telah mengalami perubahan hakikat. Dalam hal aktor, misalnya kini kegiatan diplomasi bukan hanya dilakukan oleh para diplomat profesional yang mewakili negara masing-masing.

Andrew Cooper menyebutkan bahwa aktor-aktor diplomasi bukan hanya aktor-aktor politik (pejabat negara) tetapi juga termasuk organisasi internasional, media, pejabat sektor finansial dan masyarakat. Kemudian bentuk diplomasi istilah baru, seperti diplomasi publik (public diplomacy), diplomasi olahraga (sport diplomacy) , diplomasi digital (digital diplomacy) dan diplomasi kemanusiaan (humanitarian diplomacy). Diantara lain bentuk-bentuk diplomasi yang sudah lebih dulu dikenal, seperti, diplomasi keamanan (security diplomacy), diplomasi konperensi (conference diplomacy), diplomasi makanan (food diplomacy), diplomasi dagang (trade diplomacy), dan diplomasi kebudayaan ( cultural diplomacy) (Cooper, dan Heine, dan Thakur 2013).

Menurut Andrias Darmayadi Diplomasi juga bukan milik profesi tertentu seperti para diplomat dan bukan pula sebagai kegiatan seremonial seperti acara-acara resepsi dan jamuan makan, melainkan sebagai kegiatan yang memerlukan pelaku-pelaku yang cerdas, terampil dan berwawasan internasional serta komunikatif agar sasaran yang akan dicapai dapat berhasil dengan baik. Bahkan, sekarang ini pelaku-pelaku lain seperti Lembaga-lembaga non-pemerintah banyak aktif dalam ikut memainkan diplomasi, khususnya dalam konferensi-konferensi multilateral. Dengan demikian, suksesnya diplomasi itu juga akan ditentukan oleh kualitas para pelakunya ( Darmayadi, Mulyana, Triwahyuni, Putri 2015 : 59-60)

### **2.1.3 Diplomasi Publik**

Menurut Ranny Emilia, pengertian diplomasi publik adalah sebuah diplomasi yang menekankan sebuah keterbukaan dimana sebuah negara yang berdaulat bersama dengan warga negara lain bekerja sama untuk mempengaruhi

para pendengarnya dengan terus mempromosikan kepentingan negaranya dengan tujuan menciptakan pandangan positif terhadap pemimpin atau kebijakan luar negeri suatu negara cara yang dilakukan pun cukup beragam, bisa melalui film, buku ataupun program-program yang ada di televisi. (Emilia, 2013:1)

Diplomasi Publik mewakili tiga perubahan besar dari diplomasi tradisional. Pertama, Diplomasi Publik telah bergerak melampaui negosiasi antar pemerintah untuk memasukkan publik asing. Kedua, pemerintah sudah mulai memuji dengan apa yang disebut 'Hard Power' dan 'Soft Power'. Softpower termasuk sebuah nilai daya tarik suatu negara, kinerjanya dalam hal pembangunan dan pengaruh global, budaya tradisional dan kontemporeranya, reputasinya sebagai pemain internasional dan keinginannya yaitu dalam hal kecantikan, keramahan, dan lainnya (Choi dan Kim, 2014 : 349).

Softpower sangat penting bagi negara-negara middle-power yang tidak memiliki sumber daya hardpower yang memadai untuk mencapai politik dan tujuan ekonomi yang mereka inginkan. Untuk negara-negara ini Softpower dapat berfungsi sebagai alternatif untuk meningkatkan pengaruh terhadap negara lain (Elfvig-Hwang, 2013 : 2, Lee, 2009: 123, Lee, 2012 :2, Lee dan Melissen, 2011:5). Ketiga Public Diplomacy melibatkan pemerintah dan non-pemerintah.

Diplomasi Publik termasuk ke dalam soft diplomacy, dimana diplomasi ini dilakukan untuk membentuk citra positif suatu negara di mata publik internasional dengan memikat warga negara lain untuk membuat negaranya semakin dikenal. Dalam pelaksanaannya, diplomasi publik ini menggunakan alat bantu perangkat

lunak maupun cetak yang dijalankan baik itu oleh media, lembaga, individu atau publik secara luas. Diplomasi publik menekankan gagasan alternatif dalam menyelesaikan masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme. Pelaku diplomasi publik dituntut untuk melakukan komunikasi antar budaya terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan politik luar negeri (Djelantik, 2008:213).

#### **2.1.4 Soft Power**

Dalam ilmu hubungan internasional, kita mengenal adanya konsep power, Joseph Nye, mengartikan power sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai hasil yang diinginkan (Nye Jr, 2004:2). Soft power digolongkan dalam spektrum perilaku cooptive power, yaitu kemampuan untuk dapat mempengaruhi apa yang pihak lain inginkan (what others want). Cooptive power dapat diperoleh melalui agenda setting (merubah agenda pilihan politik sehingga pihak lain gagal mengungkapkan suatu preferensi politik tertentu karena merasa preferensi tersebut terlihat tidak nyata yang bersumber pada institusi) atau dengan melalui attraction (daya tarik yang bersumber pada budaya, nilai-nilai dan kebijakan yang dimiliki (http://www.educause.edu/Resources/SoftPowerandHigherEducation/158676 diakses pada 5 april 2020).

Soft Power bersumber dari aset yang dapat dijadikan sebagai daya tarik. Soft power suatu negara didasarkan pada tiga sumber utama, yaitu: kebudayaan negara agar negara tersebut menarik bagi pihak lain, nilai politik yang dianut negara

bersangkutan, dan kebijakan luar negeri yang membuat negara bersangkutan memiliki legitimasi dan otoritas moral.

Kebudayaan adalah salah satu sumber utama soft power terdiri dari dua jenis, yakni: high culture, seperti seni, literatur dan pendidikan yang dapat menarik elit tertentu. Dan pop culture yang memfokuskan pada produksi hiburan massal (mass entertainment) (Nye Jr, 2008:96). Soft power merupakan attractive power dimana hanya dapat dihasilkan apabila sumber yang dikerahkan memiliki daya tarik yang cukup untuk mempengaruhi preferensi target yang dituju. Dengan demikian dalam pembentukan soft power selain memahami sumber, perlu juga untuk memahami faktor apa saja yang dapat membuat sumber-sumber soft power menarik dan dapat diterima oleh penerima(Nye Jr, 2008:96).

Diplomasi merupakan upaya suatu bangsa untuk mencapai kepentingan nasional dan instrumen dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri, suatu negara memiliki power untuk menunjang hal ini. Tujuan diplomasi yang diharapkan oleh suatu bangsa adalah terciptanya landasan persahabatan yang membimbing bangsa-bangsa menuju kerjasama dan perdamaian (Nye Jr, 2004:5).

### **2.1.5 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mencapai power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan

nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Perwita dan Yani, 2005:35)

Kepentingan nasional adalah konsep yang sering dibahas dalam hubungan internasional. Setiap negara yang akan melakukannya memiliki kepentingan nasional yang merupakan dasar bagi mereka dalam mengembangkan strategi hubungan internasional mereka. Kebijakan luar negeri suatu negara sangat terpengaruh pada kepentingan nasionalnya. Negara merupakan aktor yang paling dominan dalam mencapai kepentingan nasional.

Menurut Theodore Coulombis dan James Wolfie, kepentingan nasional masih menjadi konsep yang sangat penting dalam segala upaya mendeskripsikan, memprediksikan, menjelaskan atau membuat preskripsi tentang perilaku internasional(Coulombis, Wolfie 1990:74).

Beberapa pakar memiliki berbagai pendapat menafsirkan kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan menjaga identitas fisik, budaya, dan politik dari gangguan negara lain. Menurut Morgenthau, para pemimpin negara merumuskan kebijakan khusus pada negara lain yang kooperatif atau sifatnya konfliktual (Sitepu, 2011:165). Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional merupakan motivasi dari suatu negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Kemudian menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah alasan suatu negara dibalik tujuan-tujuan dan ambisinya dalam menjalankan hubungan internasional(Burchill, 2005:1).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

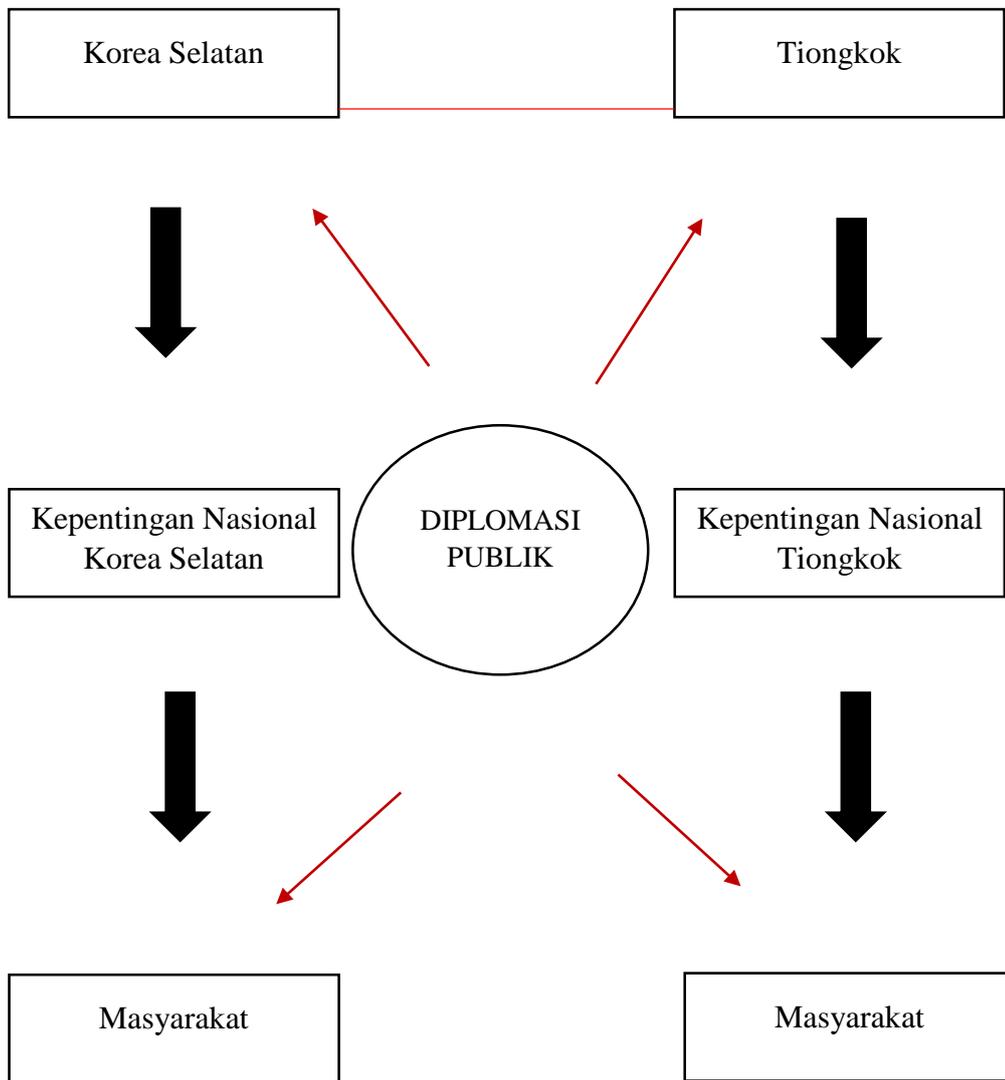
Sudah 25 tahun sejak Tiongkok dan Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik selama Perang Dingin, meskipun ada perbedaan jelas dalam ideologi dan nilai-nilai politik mereka. Secara simbolis, hubungan Tiongkok dan Korea Selatan mungkin dianggap sebagai model dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya. Tetapi hubungan itu tampaknya telah tercekik oleh keputusan Korea Selatan untuk bekerjasama dengan pihak Amerika Serikat. Setelah uji coba nuklir provokatif dan peluncuran rudal Korea Utara pada bulan-bulan sebelumnya, Korea Selatan dan Amerika Serikat bersepakat untuk melakukan Uji coba Sistem pertahanan rudal THAAD di wilayah Korea Selatan.

Setelah kesepakatan itu dibuat, China's National Tourism Administration (CNTA) menginstruksikan agensi travel Tiongkok untuk mengurangi jumlah wisatawan ke Korea Selatan hingga 20 persen (Ye & Seong 2016), agen visa Tiongkok di Korea berhenti menyediakan layanan pembuatan visa bisnis serta beberapa acara Kpop Music, TV Show, Fan Meeting selebritas Korea ditolak untuk masuk ke Tiongkok dengan kata lain Tiongkok melarang Hallyu masuk ke negaranya. Penurunan itu, tentu saja, selaras dengan keterasingan politik antara Tiongkok dan Korea Selatan pada tahun 2017.

Masalah penyebaran sistem THAAD ini berdampak pada diplomasi publik. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang salah dengan hubungan Tiongkok dan Korea

Selatan, diplomasi publik yang seharusnya menjadi landasan bersama di mana hubungan yang normal dan ramah berkembang.

Diplomasi publik dianggap relevan dalam penelitian ini, seperti cara penyebaran Hallyu di Tiongkok dengan penggunaan media cetak maupun media digital dengan konten musik ataupun film ketika adanya larangan Hallyu di Tiongkok oleh Korea Selatan dengan dijalankan oleh individu maupun kelompok. Karena dalam hal ini, Korea Selatan menggunakan individu dan perusahaan multi nasional dalam melakukan upaya menangani larangan Hallyu di Tiongkok. Tujuan yang dilakukan juga bertujuan agar membentuk citra Korea Selatan baik di mata masyarakat Tiongkok yang kemudian diharapkan dapat membangun hubungan lebih baik lagi dengan pemerintah Tiongkok. Berikut adalah gambar sederhana sketsa gambar penelitian:



*Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran*

